

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah menjadi semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintah maupun pembangunan daerahnya masing-masing melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya sendiri. Dengan demikian daerah mampu membiayai pelaksanaan urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan sehingga terwujud kemandirian daerah.

Kemandirian daerah dapat membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakatnya yang merupakan tujuan dasar penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 2002). Agar dapat terwujud tujuan penyelenggaraan otonomi daerah maka daerah perlu diberi kewenangan untuk memungut sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) seperti dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari Perusahaan Milik Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Dalam kegiatan operasionalnya, daerah membentuk dan menugaskan instansi yang mengelola kegiatan pemungutan sumber-sumber PAD yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Bagi daerah informasi kinerja Dinas

Pendapatan Daerah sangat penting karena dapat mengetahui informasi tingkat keberhasilannya dalam mengumpulkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola kegiatan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Target PAD seringkali tidak tercapai pada laporan realisasi APBD disebabkan oleh kurang efektifnya kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola kegiatan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Kurang efektifnya kinerja Dinas Pendapatan Daerah dikarenakan menurut ketentuan yang ada, jumlah PAD yang tertera dalam APBD merupakan batas minimal yang harus dicapai selama pelaksanaan APBD dan salah satu kendalanya yaitu produktivitas para aparat pelaksana pemungutan yang rendah. Menurut Devas (1989), penyebab rendahnya produktivitas para aparat pelaksana daerah adalah kecilnya insentif yang diterima oleh para aparat pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam teori organisasi modern, bahwa para karyawan akan termotivasi untuk produktif dalam bekerja jika kompensasi yang diberikan ikut mendukung pekerjaannya. Hal ini perlu diberlakukan pada Dinas Pendapatan Daerah dalam kegiatan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar perbaikan sistem insentif mendorong peningkatan produktivitas para aparat pelaksana pemungut Pendapatan Asli Daerah meningkat. Peningkatan produktivitas para aparat pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat mendorong efektivitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam pencapaian target

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik mengambil judul: **“PENGARUH SISTEM INSENTIF TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem insentif berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun?
2. Apakah sistem insentif Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun?
3. Apakah sistem insentif Pajak Hiburan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun?
4. Apakah sistem insentif Pajak Reklame berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun?
5. Apakah sistem insentif Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun?
6. Apakah sistem insentif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun?

7. Apakah sistem insentif Retribusi Ijin Trayek berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Retribusi Ijin Trayek pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa:

1. Sistem insentif berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.
2. Sistem insentif Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.
3. Sistem insentif Pajak Hiburan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.
4. Sistem insentif Pajak Reklame berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.
5. Sistem insentif Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.
6. Sistem insentif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.
7. Sistem insentif Retribusi Ijin Trayek berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Retribusi Ijin Trayek pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem insentif terhadap efektivitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas para aparat pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
2. Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sistem insentif terhadap efektivitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

1. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan skripsi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka tentang pengertian kinerja, pengukuran kinerja, kinerja Dinas Pendapatan Daerah, Efektivitas, Sistem Insentif, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka konseptual atau model penelitian dan hipotesis penelitian

3. METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan tentang desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel;

instrumen penelitian; lokasi dan waktu penelitian; prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

4. ANALISIS DATA

Bab ini menerangkan deskripsi data, hasil pengujian hipotesis dan interpretasi hasil penelitian serta pembahasan terhadap penelitian sebelumnya.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya dan PEMDA.